

**A COMPARATIVE STUDY OF THE LEGAL REGULATION OF LIMITED LAND
OWNERSHIP RIGHTS BY FOREIGN NATIONALS UNDER
INDONESIAN AND THAI LAW**

JURNAL

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SYAHDAN LAWI

NPM. 2206200582



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/AN/BAN-PT/AK/PgJ/PT.111/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400-66224567

<http://fakum.umsu.ac.id> fakum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

File original and its copy distributed
within the university

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN JURNAL

JUDUL : PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN
TANAH SECARA TERBATAS OLEH WARGA NEGARA ASING
DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

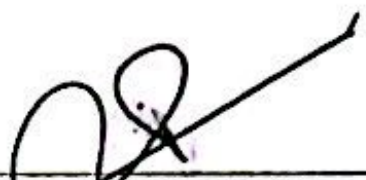
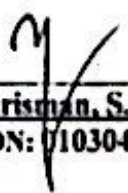
NAMA : SYAHIDAN ALWI

NPM : 2206200528

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Jurnal tersebut di atas telah diuji oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza,</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204	<u>Dr. Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN: 1103047302	<u>Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh</u> <u>Syuhada Lubis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0518098801

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/AN/BAN-PT/AK/Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> hukum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Revisi: 1.0
Masa Berlaku: 5 (lima) tahun



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN JURNAL SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAHDAN ALWI
NPM : 2206200528
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL JURNAL : PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH SECARA TERBATAS OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
2. Dr. Harisman, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

1.

2.

3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Leggal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AK/PgPT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fabum@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

File ini merupakan salinan digital yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : SYAHIDAN ALWI
NPM : 2206200528
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL JURNAL : PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH SECARA TERBATAS OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H /NIDN: 0112068204
: 2. Dr. Harisman, S.H., M.H /NIDN: 0103047302
: 3. Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H /NIDN: 0518098801

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Disini menjawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHDAN ALWI

NPM : 2206200528

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Jurnal : PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN
TANAH SECARA TERBATAS OLEH WARGA NEGARA ASING
DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



SYAHDAN ALWI



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AK/Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Disa nggah kan kua ng ager dibe rika n
Nomer kua ng ager

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN JURNAL

Panitia Ujian Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal:

NAMA : SYAHDAN ALWI
NPM : 2206200528
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL JURNAL : PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH SECARA TERBATAS OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H (NIDN. 0518098801)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

**UMSU**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN JURNAL

NAMA : SYAHIDAN ALWI
NPM : 2206200528
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL JURNAL : PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH SECARA TERBATAS OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN THAILAND
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/Januari 2020	Seminar Proposal	
1/Januari 2020	Perbaikan Judul & Rumusan Masalah	
20/Januari 2020	Bimbingan Masalah Jurnal.	
21/Februari 2020	Penyesuaian ke template jurnal.	
8/Februari 2020	Submit jurnal.	
10/Februari 2020	Revisi jurnal.	
12/Februari 2020	Terbit LOA.	
2 April 2020	Publikasi jurnal	
2 April 2020	Acc ending	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena Jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

NIDN : 0518098801



“A COMPARATIVE STUDY OF THE LEGAL REGULATION OF LIMITED LAND OWNERSHIP RIGHTS BY FOREIGN NATIONALS UNDER INDONESIAN AND THAI LAW”

Syahdan Alwi¹⁾, Mhd Teguh Syuhada Lubis²⁾

¹*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan Sumatera Utara 20238, Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan Sumatera Utara 20238, Indonesia*

^{*)}*Corresponding Author: syahdanalwi123@gmail.com, mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id*

Abstract. The regulation of land ownership rights by foreign nationals is a strategic issue in agrarian law because it directly relates to state sovereignty and foreign investment interests. This study aims to analyze legal regulations regarding limited land ownership rights for foreign nationals under agrarian law in Indonesia and Thailand, and to examine similarities and differences in these regulations in both legal systems. This research uses a normative legal research method with statutory and comparative legal approaches. The data consists of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature studies and analyzed qualitatively in a normative manner. The results show that Indonesia explicitly prohibits foreign nationals from owning freehold land based on the nationality principle in the Basic Agrarian Law, but provides limited access through use rights and lease rights regulated in the latest implementing regulations. Thailand also prohibits land ownership by foreigners under the Thailand Land Code but opens limited exceptions through investment mechanisms and long-term leases with strict administrative oversight. The similarity in both countries lies in the goal of protecting national land sovereignty, whereas the difference lies in the legal approach: Indonesia emphasizes restrictions based on the type of land rights, while Thailand focuses on restrictions based on legal subjects and investment policy. The study concludes that limited land ownership for foreign nationals in both Indonesia and Thailand represents a balance between national interests and economic development needs, but requires strengthening of oversight and policy consistency to ensure legal certainty.

Keywords: land ownership; foreign nationals; comparative agrarian law.

I. INTRODUCTION

Land is a strategic resource with fundamental value in state life because it is directly related to economic, social, cultural, and national sovereignty aspects. From a public law perspective, regulations concerning land control and ownership function not only as instruments of legal certainty but also as means for the state to regulate the utilization of agrarian resources in line with national interests. Therefore, land law in many countries generally places restrictions on foreign land ownership as part of policies to protect state sovereignty (Sitorus, 2021).

The development of globalization and the significant increase in foreign investment flows have directly impacted national land law systems. States face a dilemma between the need for foreign investment as a driver of economic growth and the constitutional obligation to ensure that land control does not freely fall into foreign hands. This condition requires legal regulations capable of balancing economic interests with the principle of state sovereignty over land (Sutaryono, 2020).

In Indonesia, regulations concerning land ownership by Foreign Nationals (Warga Negara Asing/WNA) are firmly based on the nationality principle as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (Basic Agrarian Law). This principle affirms that ownership rights over land (*hak milik*) may only be held by Indonesian citizens, while foreign nationals are only permitted to obtain limited land rights, such as rights of use (*hak pakai*) or lease rights (*hak sewa*). This regulation reflects the orientation of Indonesian agrarian law, which positions land as part of national wealth that must be protected from foreign control (Santoso, 2022).

Recent studies indicate that these normative regulations have not been fully effective in practice. Several studies reveal the continued prevalence of nominee agreements used as legal loopholes by foreign nationals to indirectly control land. Such practices raise serious issues regarding legal certainty, protection of national interests, and the potential for future agrarian conflicts (Rachman & Wibowo, 2021). This situation demonstrates a gap between *das sollen* and *das sein* in regulating land rights for foreign nationals in Indonesia. (Koto et al., 2023)

Thailand, as a country with strong appeal to foreign investors particularly in the property and tourism sectors also implements policies

restricting land ownership by foreign nationals. The Thailand Land Code B.E. 2497 (1954) fundamentally prohibits foreigners from owning land but provides limited exceptions through special licensing mechanisms, investment requirements of a certain value, and land ownership within specific area limits determined by the state. This approach shows that Thailand applies relatively strict policies while remaining adaptive to foreign investment needs (Kanchanapoom, 2020).

Recent research on Thai land law indicates that restrictions on foreign land ownership are part of national policy aimed at maintaining economic stability and preventing land speculation by foreigners. Although limited ownership opportunities are provided, the state retains full control through strict administrative supervision mechanisms. This model is considered capable of providing legal certainty while safeguarding Thailand's national interests (Chaityasit, 2022).

Several comparative studies published after 2020 reveal that although Indonesia and Thailand both restrict foreign land ownership, significant differences exist in the types of rights granted, acquisition mechanisms, and policy flexibility. Indonesia tends to impose restrictions based on types of land rights, whereas Thailand emphasizes restrictions based on legal subjects and investment value. However, these studies are generally partial and have not comprehensively examined the legal construction of limited land ownership within a normative comparative framework (Putri & Ananda, 2023).

Based on the foregoing, it can be concluded that the regulation of limited land ownership rights for foreign nationals constitutes a complex and strategic legal issue in both Indonesia and Thailand. The differing legal approaches adopted by the two countries warrant further examination through comparative legal research. Accordingly, this study focuses on the legal regulation of limited land ownership rights for foreign nationals under agrarian law in Indonesia and Thailand, as well as analyzing the similarities and differences in such regulations within the legal systems of both countries.

II. METHODS

This study is a normative legal research aimed at examining and analyzing legal regulations concerning limited land ownership rights for

foreign nationals within the legal systems of Indonesia and Thailand. The approaches employed include a statutory approach and a comparative law approach, by examining Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles along with its implementing regulations in Indonesia, as well as the Thailand Land Code B.E. 2497 (1954) as the fundamental land law in Thailand. (Abduh & Riza, 2018) The analysis is conducted prescriptively and systematically to understand the construction of norms, legal principles, and limitations on land ownership by foreign nationals in both legal systems, thereby identifying the characteristics and policy orientations of land law applied by each country (Santoso, 2022; Kanchanapoom, 2020).

The data used in this research consists of secondary data comprising primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials include laws and regulations governing land ownership by foreign nationals in Indonesia and Thailand. Secondary legal materials consist of legal textbooks, scholarly journal articles, previous research findings, and academic publications relevant to agrarian law and comparative law, while tertiary legal materials include legal dictionaries and legal encyclopedias. Data collection techniques involve literature study by reviewing and inventorying relevant legal materials, (Atika, 2021) which are then analyzed using qualitative normative analysis methods to draw conclusions regarding the similarities and differences in the regulation of limited land ownership rights for foreign nationals in the Indonesian and Thai legal systems (Sutaryono, 2020; Putri & Ananda, 2023).

III.RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Legal Regulation of Limited Land Ownership Rights for Foreign Nationals under Indonesian and Thai Agrarian Law.

The regulation of land ownership rights for foreign nationals under Indonesian agrarian law is fundamentally based on the principle of nationality, as explicitly stipulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. This provision affirms that ownership rights over land may only be held by Indonesian citizens; therefore, foreign nationals are normatively

prohibited from becoming subjects of ownership rights. This prohibition is intended to safeguard state sovereignty over land as a strategic national resource (Hidayat, 2020).

Further provisions regarding restrictions on the subjects of ownership rights are reinforced in Article 21 paragraph (3) of the Basic Agrarian Law, which states that foreign nationals who acquire ownership rights through inheritance without a will or marital property mixing are obliged to relinquish such rights within a specified period. This norm demonstrates that Indonesian agrarian law does not provide room for permanent land ownership by foreign nationals, even under incidental transfers of rights (Firmansyah, 2021).

The right of use (*hak pakai*) constitutes a form of land rights that can explicitly be granted to foreign nationals within the Indonesian legal system. The regulation of the right of use is governed by Article 42 of the Basic Agrarian Law, which provides that foreign nationals domiciled in Indonesia may hold rights of use over land. (Lubis, 2021) This provision is further strengthened by Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units, and Land Registration, which stipulates that the maximum duration of the right of use is 30 years and may be extended and renewed in accordance with prevailing laws and regulations (Nasution, 2022).

Technical regulations concerning residential ownership by foreign nationals in Indonesia are further governed by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 18 of 2021 concerning Procedures for the Determination of Management Rights and Land Rights. This regulation provides legal certainty for foreign nationals to own residential houses or apartment units under the right of use status, provided they meet residency permit requirements and minimum property value thresholds set by the government. This policy reflects the state's selective approach in granting limited ownership access to foreign nationals (Sembiring, 2023).

Lease rights over land are also recognized as a form of land control for foreign nationals, as stipulated in Article 44 of the Basic Agrarian Law. This right is civil in nature and does not establish strong proprietary relations, thereby preventing long-term control that could threaten the national land ownership structure. The recognition of lease rights demonstrates that

Indonesian agrarian law provides alternative mechanisms for land utilization by foreign nationals without transferring ownership rights (Kurniawan, 2024).

Land law regulations in Thailand generally prohibit foreign nationals from owning land, as stipulated in Section 86 of the Thailand Land Code B.E. 2497 (1954). This provision states that foreigners are not permitted to own land unless otherwise provided by law. This prohibition represents Thailand's national policy to maintain land ownership stability and prevent land speculation by foreign entities (Phanith, 2020).

Exceptions to this prohibition are regulated under Section 96 bis of the Thailand Land Code, which allows foreign nationals to own land for residential purposes if they make investments of a specified value and obtain approval from the Minister of Interior. This policy has been reaffirmed through post-2021 Thai investment policies that provide limited land ownership opportunities for strategic foreign investors, albeit subject to strict administrative requirements and explicitly limited land areas (Sirisomboon, 2022).

Foreign nationals in Thailand may also control land through long-term lease schemes as regulated under the Thai Civil and Commercial Code. These lease arrangements may be granted for up to 30 years and extended in accordance with legal provisions, without conferring ownership status. Long-term leasing mechanisms are regarded as safe legal instruments for attracting foreign investment without compromising national land sovereignty (Kiatkawsin, 2023).

A comparison of regulations in Indonesia and Thailand reveals that Indonesia provides limited ownership access through classifications of land rights, whereas Thailand emphasizes restrictions based on legal subjects with investment-based policy exceptions. These differing approaches are influenced by each country's legal system and agrarian policy orientation in responding to economic globalization (Yuliana, 2024).

The regulation of limited land ownership rights for foreign nationals in both Indonesia and Thailand fundamentally shares the same objective: preserving national land sovereignty while opening limited space for economic interests. The legal constructions adopted by both countries demonstrate that restricting land ownership by foreign nationals serves as an essential instrument in modern agrarian law to

balance national interests with the demands of foreign investment (Maulana, 2023).

3.2 Similarities and Differences in the Regulation of Limited Land Ownership Rights for Foreign Nationals in the Legal Systems of Indonesia and Thailand.

The primary similarity in the regulation of land ownership rights for foreign nationals in Indonesia and Thailand lies in the principle of restricting land ownership as a means of protecting state sovereignty. Both countries firmly prohibit foreign nationals from freely owning land under full ownership rights. This policy is grounded in the view that land constitutes a strategic resource that must remain under state control and national ownership to safeguard long-term national interests (Mahendra, 2021).

Another similarity is reflected in the provision of alternative mechanisms for limited land control by foreign nationals through specific legal arrangements. Indonesia grants access through rights of use and lease rights as regulated under the Basic Agrarian Law and its implementing regulations. Thailand provides long-term lease schemes and limited exceptions through certain investment policies. This pattern indicates that both countries adopt a selective approach in opening land access for foreign nationals to support economic interests (Anindita, 2022).

A further similarity is evident in the dominant role of the state in supervising and controlling land ownership by foreign nationals. Both Indonesia and Thailand implement strict administrative mechanisms through land authorities and relevant ministries. This oversight aims to prevent misuse of land rights that could potentially harm national interests and local communities (Pramudya, 2023).

A fundamental difference between Indonesia and Thailand lies in the normative approach used to restrict land ownership by foreign nationals. Indonesia applies restrictions based on the classification of land rights, clearly distinguishing between ownership rights, rights of use, and lease rights. Thailand, on the other hand, emphasizes restrictions based on legal subject status, with a general prohibition on foreign ownership and limited exceptions grounded in administrative policy considerations (Sukardi, 2021).

Another difference can be observed in the legal basis governing land control by foreign nationals. Indonesia regulates the matter comprehensively through hierarchical legislation, ranging from statutes to ministerial regulations. Thailand relies on a combination of the Land Code, the Civil and Commercial Code, and investment policies that may change according to national economic priorities. As a result, Thailand's regulatory framework exhibits a higher degree of flexibility compared to Indonesia (Chawalit, 2022).

A significant difference is also found in the mechanism of limited ownership through investment. Thailand allows foreign nationals to own land upon meeting specific investment thresholds and obtaining approval from the central government. Indonesia does not recognize investment-based land ownership mechanisms; instead, it grants only rights of use without altering the substantive ownership status of land (Wijanarko, 2023).

Another distinction relates to legal certainty for foreign nationals. Indonesia offers certainty through clearly classified land rights registered within the national land registration system. Thailand provides certainty through administrative approvals and strict supervision, although such certainty depends on dynamic government policies. This difference reflects the distinct characteristics of each country's legal system (Putthipong, 2024).

The implications of these differences indicate that Indonesia places greater emphasis on agrarian law stability grounded in written legal norms, whereas Thailand prioritizes economic policy flexibility while maintaining strong state control. Both approaches present advantages and limitations in ensuring legal certainty while simultaneously attracting foreign investment (Nugraha, 2022).

These similarities and differences underscore that although Indonesia and Thailand share the same objective of safeguarding national land sovereignty, the legal instruments employed differ according to the needs and characteristics of each legal system. This comparative study illustrates that there is no single model for regulating land ownership by foreign nationals; rather, regulatory variations are tailored to national interests (Kusnadi, 2024).

This comparative analysis demonstrates that the regulation of limited land ownership rights for foreign nationals constitutes a strategic issue requiring a balance between state sovereignty

and economic development needs. Indonesia and Thailand both strive to maintain this balance through different legal approaches while remaining oriented toward similar overarching objectives (Rahmatullah, 2023).

IV. CONCLUSIONS

The regulation of limited land ownership rights for foreign nationals in Indonesia and Thailand reflects a shared objective of safeguarding state sovereignty over land as a strategic national resource. Indonesia, through the Basic Agrarian Law and its implementing regulations, strictly prohibits foreign ownership rights while providing limited access through clearly regulated rights of use and lease arrangements under strong administrative control. Thailand similarly restricts foreign land ownership under the Land Code but allows limited exceptions through investment-based policies and long-term leases.

Comparatively, Indonesia demonstrates a stronger normative framework by emphasizing legal certainty through a clear classification of land rights and a structured regulatory hierarchy. This approach ensures long-term stability and consistent enforcement. Thailand, by contrast, prioritizes policy flexibility by granting discretionary authority to the state, enabling adaptive responses to economic needs but potentially reducing predictability. (Rahimah & Koto, 2022)

Overall, Indonesia's system offers a more robust legal foundation for protecting national land interests, while Thailand's model provides useful insights into controlled policy adaptability. Strengthening supervision and preventing nominee practices remain essential for Indonesia to maintain legal certainty while accommodating limited foreign investment needs. (Lubis, 2017)

REFERENCES

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Jurnal EduTech*, 4(2), 34.
- Atika Rahmi, Salamah, U., & Nasution, F. U. (2021). The UNHCR Roles For Increasing Refugees Tenacity on the Pandemic Covid-19 Era. *Proceeding International*

- Seminar on Islamic Studies, 2(1), 747–752.
- Anindita, R. (2022). Foreign land ownership policy in Southeast Asia: A comparative legal perspective. *Journal of Asian Law and Society*, 9(2), 145–160.
- Anindita, R. (2022). Foreign land ownership policy in Southeast Asia: A comparative legal perspective. *Journal of Asian Law and Society*, 9(2), 145–160.
- Arifin, Z. (2023). Kebijakan pembatasan kepemilikan tanah oleh warga negara asing dalam hukum agraria nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 77–94.
- Chantanasomboon, S. (2021). Legal restrictions on foreign land ownership under Thai land law. *Thai Journal of Law and Policy*, 14(3), 201–218.
- Chawalit, K. (2022). Investment-based land ownership exceptions in Thailand. *Asian Property Law Review*, 6(1), 33–49.
- Fadli, M. (2023). State control doctrine in Indonesian land law reform. *Indonesia Law Review*, 13(2), 189–206.
- Firmansyah, R. (2021). Prinsip nasionalitas dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan implikasinya bagi warga negara asing. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 401–416.
- Hidayat, A. (2020). Kedaulatan negara atas tanah dalam perspektif hukum agraria Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 721–738.
- Kanchanapoom, T. (2020). Foreign ownership of land and national interest protection in Thailand. *Bangkok University Law Journal*, 12(2), 89–104.
- Kiatkawsin, K. (2023). Long-term land lease for foreigners under Thai civil law. *Asian Journal of Comparative Law*, 18(1), 55–70.
- Kurniawan, D. (2024). Hak sewa tanah bagi warga negara asing dalam sistem hukum agraria Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 39(1), 112–128.
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142>
- Kusuma, R. A. (2020). Asas nasionalitas sebagai fondasi hukum agraria Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 475–492.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *Jurnal De Lega Lata*, 2(1), 92–112. <https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id>
- Lubis, M. T. S. (2021). *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Pustaka Prima.
- Laksmi, N. P. (2024). Comparative study of foreign land ownership regulation in ASEAN countries. *Journal of Legal Pluralism*, 16(2), 143–160.
- Mahendra, I. (2021). Land sovereignty and foreign ownership restrictions. *Journal of Property Law*, 8(2), 98–114.
- Maulana, Y. (2023). Pembatasan kepemilikan tanah oleh warga negara asing dalam hukum agraria modern. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 61–78.
- Nasution, A. (2022). Hak pakai bagi warga negara asing pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Agraria Indonesia*, 7(2), 134–150.
- Nugraha, S. (2022). Legal certainty and foreign investment in land sector. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 389–405.
- Pongpanich, T. (2022). Land lease regulation for foreigners in Thailand. *Journal of Thai Private Law*, 11(1), 25–41.
- Pramudya, A. (2023). Pengawasan administratif terhadap penguasaan tanah oleh warga negara asing. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(2), 211–227.
- Putri, D. A., & Ananda, R. (2023). Comparative agrarian law: Indonesia and Thailand perspectives. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1), 1–18.
- Rahmatullah, I. (2023). Balancing land sovereignty and foreign investment. *Journal of Law and Development*, 15(2), 173–190.
- Rahimah, & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society*, 3(August), 129–133. <http://kbbi.web.id/pusat>,
- Sembiring, J. (2023). Kepemilikan hunian oleh warga negara asing berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Pertanahan*, 4(2), 97–113.
- Sirisomboon, P. (2022). Foreign land ownership exceptions under Section 96 bis of Thai Land Code. *Thailand Law Journal*, 25(1), 45–60.
- Wijanarko, B. (2023). Investment-based land ownership: A comparative analysis. *ASEAN Law Review*, 10(2), 201–218.
- Yuliana, E. (2024). Legal approaches to foreign land ownership in civil law systems.

Journal of Comparative Legal Studies,
21(1), 89–105.

